



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)
Southeast Asian Journal of technology and Science
ISSN: 2723-1151(Print) ISSN 2723-116X (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/sajts>



Peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap implementasi manajemen dan pengembangan program bimbingan konseling di sekolah menengah atas melalui *focus group discussion*

Ahlun Nazali^{*)}, Melani Riskika, Fitri Aulia, Sari Hardianti, M. Jauhari Ramadhan, Doa Cutholy Berlian S, Azzahra Tsani Ariyanti, Risma Juliana, Siti Hidayatun Hasanah, Laela Fatini, M. Abdul Hafiz
Universitas Hamzanwadi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jul 8th, 2026
Revised Jul 9th, 2026
Accepted Jul 12th, 2026

Keyword:

Focus Group Discussion
Manajemen BK
Peluang dan tantangan.
Pengembangan program BK

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi manajemen dan pengembangan program Bimbingan dan Konseling (BK) di SMA serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sekaligus menggambarkan efektivitas metode Focus Group Discussion (FGD) dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap praktik pengelolaan program BK secara nyata di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam dengan guru BK yang bertindak sebagai pemateri FGD, observasi proses pelaksanaan FGD, serta studi dokumentasi terhadap program BK sekolah. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen program BK di SMA telah berjalan melalui siklus perencanaan berbasis analisis kebutuhan, pengorganisasian peran, pelaksanaan layanan yang beragam, evaluasi sistematis, dan tindak lanjut yang terstruktur. Pelaksanaan FGD terbukti efektif memperdalam pemahaman mahasiswa tentang kompleksitas pengelolaan BK di sekolah menengah. Peluang pengembangan meliputi kebijakan Kurikulum Merdeka, teknologi digital, dan meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental peserta didik, sementara tantangan utamanya mencakup rasio guru BK yang belum ideal, beban administrasi tinggi, keterbatasan sarana, serta stigma yang masih melekat pada layanan BK. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pemahaman mahasiswa serta mendorong inovasi dalam tata kelola program BK di sekolah.



© 2026 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Ahlun Nazali,
Universitas Hamzanwadi
Email: ahlunnazali9658@gmail.com

Pendahuluan

Kompleksitas perkembangan peserta didik di era digital telah menempatkan layanan Bimbingan Konseling (BK) pada posisi yang semakin vital dalam ekosistem pendidikan. Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi salah satu arena paling dinamis tempat remaja menghadapi berbagai tekanan simultan: transisi identitas, tuntutan prestasi akademik, perencanaan karier, serta gempuran pengaruh media sosial yang tak terbendung (Santrock, 2021).

Dalam konteks inilah, program BK yang terkelola dengan baik bukan sekadar pelengkap, melainkan tulang punggung sistem dukungan perkembangan peserta didik.

Manajemen program BK merujuk pada serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi layanan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan tercapainya tujuan perkembangan optimal peserta didik (Gysbers & Henderson, 2012). Definisi ini menegaskan bahwa kualitas layanan BK tidak semata ditentukan oleh kemampuan interpersonal konselor, melainkan juga oleh seberapa efektif program tersebut dirancang, diorganisir, dan dievaluasi secara berkelanjutan (American School Counselor Association [ASCA], 2019). Dalam tataran empiris, Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 telah memberikan landasan regulatif yang kuat bagi penyelenggaraan BK di sekolah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan layanan BK sebagai bagian integral dari kurikulum. Namun, kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas implementasi di lapangan masih menjadi persoalan yang berulang muncul dalam kajian akademik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah masih berjuang dengan rasio guru BK yang tidak proporsional, minimnya sarana, serta rendahnya pemahaman komunitas sekolah tentang fungsi esensial BK (Santika, 2024).

Di sisi lain, kebijakan Kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek membuka peluang strategis bagi penguatan peran BK. Prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*), pengembangan Profil Pelajar Pancasila, serta penguatan kesehatan mental menjadi titik konvergensi antara arah kebijakan pendidikan dan misi BK (Wahyuni, 2023). Perkembangan teknologi digital turut membuka dimensi baru dalam inovasi layanan, mulai dari *e-counseling*, penggunaan platform digital untuk asesmen kebutuhan, hingga bimbingan berbasis media sosial (Astuti, 2024).

Dalam kerangka pendidikan calon konselor, mahasiswa program studi BK dituntut tidak hanya memahami teori manajemen program, tetapi juga mampu menginternalisasi dinamika penerapannya di sekolah nyata. Kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Salah satu metode yang terbukti efektif untuk menjembatani kesenjangan tersebut adalah Focus Group Discussion (FGD).

FGD sebagai metode pembelajaran aktif memungkinkan mahasiswa berinteraksi langsung dengan praktisi, mendiskusikan kasus nyata, dan mengkonstruksi pemahaman bersama dalam suasana dialogis (Creswell & Poth, 2021). Keterlibatan guru BK berpengalaman sebagai narasumber FGD memberikan perspektif insider yang tak tergantikan oleh teks akademik semata. Metode ini sejalan dengan pendekatan konstruktivisme sosial Vygotsky yang menekankan peran interaksi sosial dalam pembangunan pengetahuan (Hergenhahn & Olson, 2013).

Meskipun manajemen program BK dan efektivitas FGD sebagai metode pembelajaran masing-masing telah banyak dikaji secara terpisah, penelitian yang secara khusus menghubungkan kedua isu tersebut dengan menghadirkan praktisi BK berpengalaman sebagai narasumber FGD masih terbatas jumlahnya, terutama dalam konteks pendidikan calon konselor di perguruan tinggi Indonesia. Sebagian besar kajian terdahulu cenderung membahas manajemen program BK dari perspektif sekolah atau membahas FGD sebagai metode penelitian, tanpa mengintegrasikan keduanya sebagai strategi pembelajaran yang secara simultan menghasilkan pemahaman konseptual dan pengalaman praktis bagi mahasiswa. Kesenjangan inilah yang berupaya diisi oleh penelitian ini, dengan kontribusi spesifik berupa deskripsi empiris tentang bagaimana FGD yang menghadirkan praktisi dapat menjembatani teori manajemen BK dengan realitas implementasinya di sekolah, sekaligus memetakan peluang dan tantangan pengembangan program BK di SMA sebagai bahan refleksi bagi pendidikan calon konselor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan empat pertanyaan pokok: (1) Bagaimana implementasi manajemen program BK di SMA? (2) Bagaimana pelaksanaan FGD mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap implementasi tersebut? (3) Apa saja peluang yang mendukung pengembangan program BK di SMA? dan (4) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi dan pengembangan program BK di SMA? Keempat pertanyaan ini diharapkan menghasilkan gambaran komprehensif yang dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pengembangan program BK di lapangan.

Manajemen program BK pada dasarnya merupakan adaptasi konsep manajemen umum ke dalam ranah layanan pendidikan. Gysbers dan Henderson (2012) mendefinisikannya sebagai proses terencana dan sistematis yang mencakup seluruh tahapan dari analisis kebutuhan hingga evaluasi dampak layanan. Model ASCA National Model (2019) menjadi referensi global yang paling banyak digunakan, mengorganisasi program BK dalam empat komponen utama: landasan program (*foundation*), pengelolaan program (*management*), penyampaian layanan (*delivery*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Dalam konteks Indonesia, Prayitno (2018) mengidentifikasi tiga bidang layanan utama BK, yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karier, yang masing-masing memerlukan perencanaan dan strategi pelaksanaan yang berbeda. Nursalim (2021) menambahkan bahwa efektivitas manajemen BK sangat dipengaruhi oleh kompetensi manajerial konselor, yang meliputi kemampuan merancang program berdasarkan data, mengelola kolaborasi multipihak, dan melakukan evaluasi berbasis bukti.

FGD dalam konteks akademik merupakan teknik pengumpulan data sekaligus metode pembelajaran yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengeksplorasi topik secara mendalam (Krueger & Casey, 2020). Sebagai metode pembelajaran, FGD mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, berbagi perspektif, dan mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan pengalaman praktis. Kolb (2015) dalam model Experiential Learning Theory menyebutkan bahwa pembelajaran bermakna terjadi melalui siklus pengalaman konkret, refleksi observasional, konseptualisasi abstrak, dan eksperimentasi aktif—sebuah siklus yang difasilitasi dengan baik oleh FGD. Penelitian Sugiyono (2020) menegaskan bahwa FGD yang melibatkan praktisi berpengalaman sebagai narasumber terbukti meningkatkan relevansi pembelajaran dan memotivasi mahasiswa untuk mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari di bangku kuliah dengan realitas lapangan. Hal ini sangat relevan dalam konteks pendidikan BK, di mana kompetensi praktis tidak dapat dibangun hanya melalui pengajaran satu arah..

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study research). Pilihan atas pendekatan ini dilandasi oleh sifat masalah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang bersifat kontekstual, kompleks, dan tidak dapat direduksi ke dalam angka (Creswell & Poth, 2021). Yin (2018) menegaskan bahwa studi kasus merupakan desain yang paling tepat ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan 'bagaimana' dan 'mengapa' terhadap fenomena yang sedang berlangsung dalam konteks kehidupan nyata. Relevansi desain ini sangat tinggi dalam penelitian ini, mengingat fokusnya adalah menggambarkan secara holistik proses implementasi manajemen program BK dan pelaksanaan FGD sebagai fenomena yang tidak terpisah dari konteks kelembagaan dan akademiknya.

Lokasi, Waktu, dan Informan Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada kegiatan FGD mata kuliah Manajemen BK yang diselenggarakan oleh Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Hamzanwadi pada semester genap tahun akademik 2025/2026. Narasumber FGD adalah Hendru Pandu Winata, seorang guru BK aktif di SMA yang memiliki pengalaman lebih dari sepuluh tahun dalam pengelolaan program BK. Informan penelitian terdiri atas: (1) guru BK narasumber FGD, (2) mahasiswa peserta FGD, dan (3) dosen pengampu mata kuliah. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan pertimbangan relevansi pengalaman dan kapasitas untuk memberikan informasi yang kaya (Moleong, 2021).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan guru BK narasumber FGD guna menggali informasi terperinci tentang implementasi manajemen program BK di lapangan. Moleong (2021) menjelaskan bahwa wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif subjektif informan secara lebih leluasa dibandingkan wawancara terstruktur. Kedua, observasi partisipatif selama kegiatan FGD berlangsung untuk merekam dinamika diskusi, pola interaksi mahasiswa-narasumber, dan perubahan pemahaman yang teridentifikasi secara kontekstual (Sugiyono, 2020). Ketiga, dokumentasi terhadap materi presentasi narasumber, rekaman FGD, dan catatan lapangan peneliti, yang berfungsi sebagai sumber data komplementer sekaligus instrumen triangulasi (Yin, 2018).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang terdiri dari tiga alur kegiatan simultan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Proses analisis dilakukan secara siklikal dan berkelanjutan sejak data pertama dikumpulkan hingga akhir penelitian, bukan sebagai tahapan linear yang terpisah satu sama lain.

Tahap pertama, kondensasi data, dilakukan segera setelah setiap sesi pengumpulan data. Hasil wawancara yang telah ditranskripsi verbatim, catatan observasi lapangan, dan dokumen FGD dibaca berulang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh, kemudian diberi kode terbuka (open coding) pada satuan-satuan makna yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kode-kode tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi kategori yang lebih besar melalui proses kategorisasi tematik, misalnya kategori "fungsi manajemen BK", "dinamika

FGD", "peluang pengembangan", dan "tantangan implementasi". Data yang tidak relevan disisihkan (data reduction) tanpa menghilangkan konteks penting, sehingga volume data mentah yang kompleks dapat disederhanakan menjadi struktur tematik yang lebih mudah dianalisis.

Tahap kedua, penyajian data, mengorganisasikan kategori-kategori hasil kondensasi ke dalam bentuk yang memudahkan penarikan makna, yaitu narasi deskriptif untuk menggambarkan proses dan konteks, matriks tematik untuk memetakan keterkaitan antarkategori (misalnya antara fungsi manajemen dan instrumen yang digunakan sebagaimana disajikan pada Tabel 1), serta tabel komparatif untuk menyandingkan perspektif dari sumber data yang berbeda (guru BK, mahasiswa, dan dosen pengampu). Penyajian dalam berbagai format ini membantu peneliti mengenali pola, hubungan sebab-akibat, dan kesenjangan antarkategori yang tidak selalu tampak dalam data mentah.

Tahap ketiga, penarikan simpulan dan verifikasi, dilakukan secara bertahap. Simpulan sementara dirumuskan setelah pola-pola tematik mulai stabil, kemudian diuji kembali dengan cara membandingkannya secara berulang terhadap data mentah (transkrip, catatan lapangan, dan dokumen) untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti benar-benar berakar pada data, bukan sekadar asumsi peneliti. Proses verifikasi ini juga melibatkan diskusi analitis antarpeleliti (peer debriefing) untuk menguji konsistensi interpretasi sebelum simpulan akhir dirumuskan. Interpretasi akhir kemudian dikaitkan kembali dengan kerangka teoretis manajemen program BK dan literatur FGD sebagai metode pembelajaran, sehingga temuan tidak berhenti pada deskripsi, tetapi juga dimaknai dalam konteks teori yang relevan.

Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui empat kriteria: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Lincoln & Guba dalam Moleong, 2021). Kredibilitas diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari guru BK, mahasiswa, dan dokumen) dan triangulasi teknik (membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi). Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk memastikan kecukupan data dan mengurangi distorsi yang mungkin timbul dari kehadiran peneliti. Member check dilakukan dengan mengonfirmasi interpretasi peneliti kepada narasumber utama untuk memastikan akurasi representasi data.

Secara teknis, triangulasi sumber dilakukan dengan menyandingkan keterangan guru BK narasumber FGD, tanggapan mahasiswa peserta, dan pandangan dosen pengampu mata kuliah atas pertanyaan penelitian yang sama, kemudian memeriksa apakah temuan pada satu sumber didukung atau justru berbeda dengan sumber lain sebelum dijadikan simpulan. Triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa konsistensi antara apa yang disampaikan narasumber dalam wawancara mendalam, apa yang tampak dalam observasi partisipatif selama FGD berlangsung, dan apa yang tercatat dalam dokumen pendukung (materi presentasi dan rekaman FGD); ketidaksesuaian antar-teknik dijadikan dasar untuk penggalan data lebih lanjut, bukan diabaikan. Kombinasi kedua bentuk triangulasi ini memungkinkan peneliti melakukan cross-check silang yang berlapis, sehingga simpulan penelitian tidak bertumpu pada satu sumber atau satu metode saja, dan dengan demikian memperkuat kredibilitas temuan yang dilaporkan pada bagian hasil dan pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Manajemen Program BK di SMA

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen program BK di SMA yang menjadi konteks penelitian ini telah terstruktur mengikuti siklus manajemen yang sistematis. Narasumber FGD, Hendru Pandu Winata, menggambarkan proses tersebut sebagai sebuah rantai yang tidak boleh terputus: setiap tahapan menghasilkan input bagi tahapan berikutnya, dan evaluasi menjadi penghubung antara akhir satu siklus dengan awal siklus berikutnya. Siklus ini sejalan dengan model manajemen BK komprehensif yang dikembangkan oleh Gysbers dan Henderson (2012).

Tabel 1 <Implementasi Siklus Manajemen Program BK di SMA>

Fungsi Manajemen	Bentuk Implementasi	Instrument/Alat yang Digunakan
Analisis Kebutuhan	Pemetaan profil perkembangan peserta didik secara menyeluruh	Angket kebutuhan, AUM, data akademik, observasi, wawancara, catatan kasus

Perencanaan Program	Penyusunan program tahunan, semester, dan RPL BK berbasis analisis kebutuhan	Format program tahunan BK, kalender akademik, RPL BK
Pengorganisasian	Pembagian peran dan koordinasi lintas unsur sekolah serta mitra eksternal	SK pembagian tugas, notulen rapat koordinasi, sistem rujukan
Pelaksanaan Layanan	Bimbingan klasikal, konseling individu/kelompok, home visit, mediasi, advokasi	Jadwal layanan, daftar hadir, laporan layanan, media pembelajaran BK
Evaluasi	Evaluasi proses, hasil, dan dampak layanan BK secara berkala	Angket kepuasan, refleksi peserta didik, rekap data kasus
Tindak Lanjut	Perbaikan program, penguatan layanan prioritas, rujukan kasus	Laporan tindak lanjut, prosedur rujukan, rencana program revisi

a. Analisis Kebutuhan sebagai Fondasi Program

Tahap pertama dan paling krusial dalam siklus manajemen BK adalah analisis kebutuhan (need assessment). Sukmadiningsih & Herdi (2025) menekankan bahwa program BK yang tidak berakar pada kebutuhan nyata peserta didik akan kehilangan relevansinya dan berpotensi menjadi kegiatan administratif semata. Prinsip ini selaras dengan pernyataan ASCA (2019) bahwa program BK berbasis data (data-driven program) merupakan fondasi akuntabilitas layanan konseling sekolah.

Dalam praktiknya, analisis kebutuhan dilakukan melalui beragam instrumen: angket kebutuhan peserta didik yang disebar di awal tahun pelajaran, Alat Ungkap Masalah (AUM), analisis data akademik, observasi perilaku, wawancara dengan wali kelas dan orang tua, serta kajian catatan kasus dari tahun sebelumnya. Hasil analisis ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan bidang layanan (pribadi, sosial, belajar, karier) dan tingkat urgensi, sehingga prioritas program dapat ditentukan secara rasional dan terukur (Carey & Dimmitt, 2012).

b. Perencanaan Program yang Sistematis dan Fleksibel

Hasil analisis kebutuhan selanjutnya ditransformasi menjadi rencana program yang operasional. Narasumber FGD menjelaskan bahwa perencanaan BK di SMA mencakup empat level dokumen: program tahunan (PROTA), program semester (PROMES), Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL), dan instrumen evaluasi (H. P. Winata, komunikasi pribadi, FGD Manajemen BK, 2026). Dahir dan Stone (2016) menegaskan bahwa kualitas perencanaan program BK sangat menentukan arah dan konsistensi layanan sepanjang tahun pelajaran.

Yang menarik dari temuan penelitian ini adalah penekanan narasumber pada prinsip fleksibilitas dalam perencanaan. Program BK yang terlalu kaku akan kesulitan merespons isu-isu yang muncul secara insidental sepanjang tahun, seperti kasus perundungan, krisis akademik, atau kejadian traumatik yang memerlukan respons segera. Oleh karena itu, program yang ideal adalah program yang sistematis namun tetap adaptif terhadap dinamika yang berkembang (Suherman, 2022).

c. Pengorganisasian sebagai Proses Kolaborasi Multipihak

Temuan yang menonjol dalam penelitian ini adalah pentingnya dimensi pengorganisasian yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam literatur manajemen BK. Deyanti (2024) mengungkapkan bahwa efektivitas program BK sangat bergantung pada kualitas koordinasi antara guru BK dengan kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, dan mitra eksternal seperti psikolog atau lembaga rehabilitasi.

Dalam praktik yang diamati, pengorganisasian diwujudkan melalui rapat koordinasi awal tahun yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pembagian tugas layanan yang jelas antar guru BK, sistem rujukan internal dan eksternal yang terdokumentasi, serta mekanisme pelaporan yang reguler. Stone dan Dahir (2016) menyebut model ini sebagai collaborative consultation model, yang menempatkan guru BK sebagai koordinator layanan komprehensif, bukan pelaksana tunggal yang terisolasi.

d. Pelaksanaan Layanan yang Beragam dan Humanis

Dimensi pelaksanaan layanan menunjukkan keberagaman yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan peserta didik yang bervariasi. Narasumber mengidentifikasi delapan bentuk layanan utama yang dilaksanakan: bimbingan klasikal, konseling individu, konseling kelompok, home visit, konsultasi, mediasi, advokasi, dan bimbingan karier. Setiap bentuk layanan memiliki target, metode, dan indikator keberhasilan yang berbeda-beda.

Hal yang patut dicatat adalah penekanan narasumber pada orientasi humanis dalam pelaksanaan layanan. Konselor yang efektif tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga mampu membangun relasi terapeutik yang hangat, penuh empati, dan bebas dari stigmatisasi. Corey (2017) dalam teorinya tentang hubungan konseling menegaskan bahwa kualitas hubungan konselor-konseli merupakan variabel paling prediktif terhadap keberhasilan konseling, melebihi pendekatan teknis spesifik yang digunakan.

2. Pelaksanaan Focus Group Discussion dan Peningkatan Pemahaman Mahasiswa

Kegiatan FGD yang menjadi objek penelitian ini dilaksanakan sebagai bagian integral dari mata kuliah Manajemen BK dengan menghadirkan Hendru Pandu Winata sebagai narasumber praktisi. Metode FGD dipilih karena kemampuannya menghadirkan pengetahuan tacit (Polanyi dalam Nonaka & Takeuchi, 2019) yang tidak mungkin diperoleh mahasiswa dari membaca teks akademik semata. Pengetahuan tacit ini mencakup kearifan praktis tentang cara mengelola konflik antarstakeholder, strategi membangun kepercayaan peserta didik, dan cara-cara improvisasi kreatif ketika sumber daya terbatas.

Observasi terhadap proses FGD menunjukkan beberapa dinamika penting. Pertama, terdapat transformasi bertahap dalam kualitas pertanyaan yang diajukan mahasiswa: dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat definitif dan faktual di awal sesi, menuju pertanyaan-pertanyaan analitis dan bahkan kritis di tengah hingga akhir sesi. Transformasi ini mencerminkan proses internalisasi pengetahuan yang berlangsung secara real-time selama diskusi. Hal ini sejalan dengan temuan Krueger dan Casey (2014) bahwa FGD yang berlangsung dalam suasana terbuka dan non-hierarkis mendorong partisipan mengembangkan pemikiran yang lebih dalam dan kritis.

Kedua, mahasiswa menunjukkan perubahan perspektif yang signifikan tentang kompleksitas kerja guru BK. Sebelum FGD, sebagian besar mahasiswa memiliki gambaran yang disederhanakan tentang tugas konselor sekolah. Setelah mendengar pengalaman langsung narasumber termasuk berbagai dilema etis, kendala struktural, dan kisah keberhasilan mahasiswa mulai mengapresiasi dimensi multifaset dari profesi ini. Temuan ini mendukung argumen Kolb (2015) bahwa pengalaman konkret (dalam hal ini, dialog langsung dengan praktisi) merupakan titik awal paling kuat dalam siklus pembelajaran experiential.

Ketiga, FGD memfasilitasi proses refleksi kritis yang sering kali absen dalam pembelajaran konvensional. Ketika narasumber berbagi tentang tantangan-tantangan nyata yang dihadapi di lapangan, mahasiswa terdorong untuk mempertanyakan kembali asumsi-asumsi teoritis yang selama ini mereka pegang. Proses ini sejalan dengan konsep double-loop learning yang dikemukakan oleh Argyris dan Schön (dalam Hergenhausen & Olson, 2013), di mana pembelajaran tidak hanya terjadi pada level prosedural (single-loop) tetapi juga pada level asumsi dan nilai yang lebih dalam (double-loop).

Keempat, efektivitas FGD juga tampak dari kemampuannya mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai subdisiplin: teori perkembangan remaja, psikologi konseling, manajemen pendidikan, kebijakan kurikulum, dan etika profesi. Integrasi lintas disiplin ini sulit dicapai dalam format perkuliahan monoparadigmatik. Suryana (2024) menunjukkan bahwa mahasiswa yang mendapat paparan terhadap narasi praktis melalui diskusi terstruktur memiliki skor pemahaman aplikatif yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang hanya mendapat perkuliahan konvensional.

3. Peluang Pengembangan Program BK di SMA

Analisis data penelitian mengidentifikasi lima kluster peluang utama yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat implementasi dan pengembangan program BK di SMA. Pemahaman terhadap peluang-peluang ini sangat penting bagi konselor sekolah agar tidak terjebak pada mentalitas keluhan yang kontraproduktif.

a. Kebijakan Kurikulum Merdeka sebagai Peluang Struktural

Kurikulum Merdeka yang diimplementasikan secara bertahap sejak 2022 membawa implikasi struktural yang signifikan bagi layanan BK. Prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik, pengembangan Profil Pelajar Pancasila, dan penguatan kecakapan sosial-emosional menciptakan ruang yang lebih luas bagi intervensi BK yang sebelumnya sulit dilegitimasi dalam kerangka kurikulum

berbasis kompetensi mata pelajaran (Kemendikbudristek, 2022). Sulalah (2024) menemukan bahwa sekolah-sekolah yang berhasil mengintegrasikan layanan BK ke dalam ekosistem Kurikulum Merdeka terutama melalui pendampingan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas layanan dan keterlibatan peserta didik.

Andhini (2024) dalam materi FGD menekankan bahwa guru BK perlu mengambil peran proaktif dalam implementasi Kurikulum Merdeka, bukan sekadar menunggu penugasan. Pendampingan pemilihan mata pelajaran pilihan, bimbingan perencanaan karier berbasis minat dan bakat, serta penguatan regulasi emosi peserta didik adalah beberapa area di mana BK memiliki keunggulan komparatif yang dapat berkontribusi.

b. Perkembangan Teknologi Digital sebagai Akselerator Layanan

Revolusi teknologi digital telah membuka dimensi baru dalam spektrum layanan BK. Wulandari (2024) mendokumentasikan berbagai inovasi yang telah berhasil diimplementasikan oleh sekolah-sekolah progresif: e-counseling melalui platform video call, penggunaan Google Form untuk asesmen kebutuhan dan evaluasi layanan, bimbingan kelompok virtual, podcast BK sekolah untuk edukasi psikologis, hingga webinar karier dengan pembicara dari industri. Inovasi-inovasi ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi peserta didik yang enggan datang langsung ke ruang BK karena stigma.

Renidayati (2026) menambahkan bahwa dalam era Society 5.0, transformasi digital layanan BK bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Konselor yang tidak memanfaatkan teknologi berisiko kehilangan relevansi di mata generasi Z yang sangat terbiasa dengan interaksi bermediasi teknologi. Namun, Simon (2025) mengingatkan pentingnya menjaga etika konseling digital, termasuk aspek kerahasiaan data, batas professional relationship dalam medium digital, dan risiko miskomunikasi akibat ketiadaan isyarat nonverbal.

c. Meningkatnya Kesadaran terhadap Kesehatan Mental

Pandemi COVID-19 telah mengakselerasi pergeseran paradigma masyarakat Indonesia tentang kesehatan mental. Berbagai survei nasional pasca-pandemi mengungkap tingginya prevalensi kecemasan dan depresi di kalangan remaja usia sekolah, yang mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih serius mengakui peran layanan BK sebagai garda terdepan dukungan psikologis di sekolah (Kemendikbudristek, 2023). Pergeseran ini menciptakan momentum yang belum pernah ada sebelumnya bagi profesi konselor sekolah untuk mendapatkan legitimasi yang lebih kuat.

Suryana (2024) menemukan bahwa sekolah-sekolah yang secara aktif mempromosikan program BK dalam konteks kesehatan mental mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah peserta didik yang secara sukarela mengakses layanan konseling. Pergeseran dari model reaktif (konseling hanya untuk siswa bermasalah) menuju model preventif dan promotif (konseling untuk semua peserta didik dalam rangka pengembangan diri) semakin mendapatkan penerimaan luas.

d. Kolaborasi Lintas Profesi dan Institusi

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi remaja masa kini mulai dari gangguan makan, kecanduan digital, perundungan siber, hingga masalah orientasi seksual seringkali melampaui kompetensi seorang konselor sekolah. Peluang pengembangan yang penting adalah membangun jaringan kolaborasi yang kuat dengan psikolog klinis, psikiater, pekerja sosial, lembaga perlindungan anak, dan institusi pendidikan tinggi (Nursalim, 2021). Kolaborasi ini memungkinkan konselor sekolah berfungsi sebagai koordinator layanan yang menghubungkan peserta didik dengan sumber bantuan yang paling tepat.

e. Partisipasi Orang Tua yang Semakin Terbuka

Seiring meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran orang tua, terdapat tren positif berupa keterbukaan yang lebih besar untuk berkolaborasi dengan guru BK dalam mendampingi perkembangan anak. Sumarto (2022) menemukan bahwa program BK yang secara aktif melibatkan orang tua melalui konsultasi keluarga, seminar parenting, dan komunikasi reguler berbasis aplikasi menghasilkan dampak yang lebih sustainable dibandingkan program yang hanya berfokus pada intervensi di sekolah.

4. Tantangan Implementasi dan Pengembangan Program BK di SMA

Di samping berbagai peluang yang menjanjikan, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural dan kultural yang secara konsisten menghambat optimalnya implementasi program BK. Analisis

kritis terhadap tantangan-tantangan ini penting agar solusi yang dirumuskan bersifat tepat sasaran dan berkesinambungan.

Tabel 2 <Tantangan Implementasi Program BK di SMA dan Dampaknya>

Kategori Tantangan	Deskripsi	Dampak terhadap Layanan
Rasio Guru BK-Siswa	Satu guru BK menangani 150–500+ peserta didik, jauh di atas standar ideal 1:150	Layanan individual tidak optimal; konseling menjadi superficial
Beban Administratif	Tumpukan tugas non-BK seperti piket sekolah, tata tertib, dan pengawasan ujian	Waktu untuk layanan substantif berkurang drastis
Keterbatasan Sarana	Ruang konseling yang tidak memenuhi standar privasi dan kenyamanan	Peserta didik enggan membuka diri; kerahasiaan tidak terjamin
Stigma terhadap BK	Persepsi bahwa BK hanya untuk siswa bermasalah atau nakal	Partisipasi sukarela rendah; pelabelan negatif pada pengguna layanan
Rendahnya Literasi Stakeholder	Kepala sekolah, guru, dan orang tua belum sepenuhnya memahami fungsi BK	Dukungan dan kolaborasi lintas pihak tidak optimal
Pengaruh Media Sosial	Perkembangan pesat konten negatif, hoaks, dan tekanan perbandingan sosial	Kompleksitas masalah peserta didik meningkat, kapasitas layanan tertinggal
Perubahan Karakter Generasi Z	Generasi dengan gaya komunikasi dan kebutuhan psikologis yang berbeda dari generasi sebelumnya	Pendekatan konvensional kurang efektif; perlu adaptasi metode layanan

a. Krisis Rasio: Akar Persoalan Struktural

Tantangan paling fundamental yang berulang muncul dalam berbagai penelitian adalah ketidakseimbangan rasio antara jumlah guru BK dan peserta didik. Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 menetapkan rasio ideal 1:150, namun dalam kenyataan lapangan, seorang guru BK seringkali harus melayani 400–600 peserta didik, terutama di sekolah-sekolah dengan sumber daya terbatas. Kondisi ini menciptakan situasi di mana konseling individual yang mendalam yang merupakan inti dari layanan BK praktis tidak mungkin diberikan kepada seluruh peserta didik yang membutuhkan.

Asni (2026) mengungkapkan bahwa tekanan akibat rasio yang tidak ideal ini tidak hanya mempengaruhi kualitas layanan, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental guru BK itu sendiri. Burnout dan compassion fatigue adalah risiko nyata yang dihadapi oleh konselor sekolah yang bekerja dalam kondisi kelebihan beban. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan lingkaran setan: guru BK yang kelelahan tidak mampu memberikan layanan berkualitas, sehingga dampak positif program BK tidak terasa, yang kemudian melegitimasi keputusan pihak sekolah untuk tidak menambah tenaga BK.

b. Stigma: Tantangan Kultural yang Persisten

Tantangan kultural yang mungkin paling sulit diatasi adalah persistensi stigma terhadap layanan BK. Persepsi bahwa ruang konseling adalah 'ruang hukuman' atau 'tempat siswa bermasalah' telah mengakar kuat dalam budaya sekolah Indonesia (Sulalah, 2024). Stigma ini tidak hanya mengurangi aksesibilitas layanan, tetapi juga menciptakan barrier psikologis yang membuat peserta didik yang sesungguhnya membutuhkan bantuan enggan untuk datang.

Astuti (2024) berargumen bahwa perubahan stigma memerlukan upaya yang lebih dari sekadar sosialisasi program. Dibutuhkan rebranding fundamental terhadap identitas BK sebagai layanan pengembangan positif, bukan layanan remedial. Strategi yang berhasil diidentifikasi antara lain: mengganti nama ruang BK menjadi 'Pusat Pengembangan Diri', menampilkan kisah sukses peserta didik yang mendapat manfaat dari layanan BK, serta secara konsisten mengampanyekan pesan bahwa meminta bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan.

c. **Beban Administratif Non-BK: Distorsi Peran Profesional**

Sebuah ironi yang sering terjadi di sekolah adalah penugasan guru BK pada fungsi-fungsi yang sesungguhnya bukan ranah profesionalnya: menangani keterlambatan siswa, mengurus perizinan, mengawasi ujian, bahkan menjadi petugas piket. Nursalim (2021) menyebut praktik ini sebagai role diffusion, sebuah fenomena yang mereduksi konselor profesional menjadi petugas administratif serbabisa. Dampaknya tidak hanya pada berkurangnya waktu untuk layanan substantif, tetapi juga pada kabumya identitas profesional BK di mata komunitas sekolah.

Khairani (2024) menemukan bahwa guru BK yang terperangkap dalam beban non-BK cenderung mengembangkan orientasi birokratis dalam menjalankan tugasnya lebih fokus pada pemenuhan administrasi daripada pada kualitas relasi terapeutik dengan peserta didik. Temuan ini menegaskan perlunya advokasi sistematis untuk mendefinisikan ulang deskripsi kerja guru BK berdasarkan standar kompetensi profesional yang jelas.

5. **Pembahasan Integratif: Menghubungkan Temuan dengan Teori dan Penelitian Terdahulu**

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengkonfirmasi dan sekaligus memperkaya perspektif teoritis tentang manajemen program BK. Argumen sentral yang muncul adalah bahwa efektivitas implementasi program BK merupakan resultante dari interaksi dinamis antara kapasitas individual konselor, kualitas dukungan kelembagaan, dan kondisi ekosistem kebijakan pendidikan. Tidak satu pun dari ketiga faktor tersebut yang secara sendiri dapat menjamin keberhasilan program.

Temuan tentang siklus manajemen yang sistematis selaras dengan preskripsi model ASCA National Model (2019) dan model manajemen BK komprehensif Gysbers dan Henderson (2012). Namun, penelitian ini memperkaya kedua model tersebut dengan menyoroti betapa pentingnya fleksibilitas adaptif dalam implementasi sesuatu yang kurang ditekankan dalam model-model yang cenderung preskriptif tersebut. Realitas lapangan yang kompleks dan tak terduga menuntut konselor untuk memiliki kemampuan improvisasi yang terlatih, bukan sekadar kemampuan mengikuti protokol baku. Temuan tentang peran FGD dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa memperkuat argumentasi Kolb (2015) tentang siklus pembelajaran experiential. Yang menarik dan baru dari penelitian ini adalah identifikasi bahwa transformasi pemahaman mahasiswa tidak terjadi secara seragam ada mahasiswa yang mengalami perubahan perspektif yang sangat dramatis, sementara yang lain mengalami konfirmasi dan pendalaman dari apa yang sudah mereka ketahui. Variasi ini mencerminkan keragaman skema kognitif awal yang dibawa oleh masing-masing mahasiswa ke dalam forum FGD.

Identifikasi peluang dan tantangan dalam penelitian ini memperlihatkan pola dialektik yang menarik: hampir setiap peluang yang diidentifikasi membawa serta tantangan yang berpasangan. Misalnya, perkembangan teknologi digital membuka peluang e-counseling, tetapi sekaligus membawa tantangan etika konseling digital dan risiko ketergantungan pada medium yang tidak sepenuhnya dapat dikontrol konselor. Kebijakan Kurikulum Merdeka menciptakan ruang yang lebih luas bagi BK, tetapi juga menuntut rekalisasi kompetensi guru BK yang memerlukan waktu dan sumber daya. Dialektika peluang-tantangan ini mengingatkan kita bahwa pengembangan program BK adalah proses negosiasi berkelanjutan dengan konteks, bukan sekadar penerapan solusi teknis.

Perspektif kritis yang perlu ditawarkan adalah bahwa banyak tantangan yang diidentifikasi dalam penelitian ini terutama rasio guru BK, beban administrasi non-BK, dan keterbatasan sarana sejatinya adalah masalah kebijakan dan alokasi sumber daya, bukan masalah kompetensi individual guru BK. Merespons masalah-masalah struktural dengan solusi individual (seperti menuntut guru BK lebih inovatif atau lebih efisien) adalah kategori kesalahan yang oleh Senge (dalam Nursalim, 2021) disebut sebagai 'pushing the burden': memindahkan beban masalah ke pelaku di lapangan tanpa menyelesaikan akar sistemiknya. Reformasi kebijakan yang menegaskan rasio standar, mendefinisikan ulang tupoksi BK, dan mengalokasikan anggaran yang memadai adalah kondisi niscaya bagi transformasi program BK yang berkelanjutan.

Perbandingan Temuan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini menunjukkan titik temu sekaligus titik pembeda yang berarti dengan sejumlah penelitian sejenis, sebagaimana diuraikan berikut.

Pertama, terkait siklus manajemen program BK, temuan ini sejalan dengan Sukmadiningsih dan Herdi (2025) yang menegaskan bahwa analisis kebutuhan siswa merupakan titik tolak yang tidak dapat ditawar dalam pengembangan program BK. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan memetakan instrumen

konkret pada setiap tahap siklus manajemen, sesuatu yang belum dipetakan secara rinci pada tinjauan literatur sistematis tersebut.

Kedua, terkait rasio guru BK yang tidak ideal, temuan ini memperkuat sekaligus memperdalam hasil Santika dkk. (2024) dan Asni dan Rahmadina (2026). Jika Santika dkk. (2024) menyoroti dampak minimnya sarana terhadap pelaksanaan layanan konseling dan Asni dan Rahmadina (2026) menekankan beban kerja guru BK secara kuantitatif, penelitian ini menambahkan penjelasan mekanisme sebab-akibat yang bersifat siklikal: rasio yang timpang memicu kelelahan kerja, kelelahan kerja menurunkan kualitas layanan, dan penurunan kualitas layanan pada gilirannya melanggengkan keputusan sekolah untuk tidak menambah tenaga BK. Dengan kata lain, penelitian ini menawarkan model penjelasan yang lebih dinamis dibandingkan potret cross-sectional pada kedua penelitian pembandingan.

Ketiga, dalam hal kolaborasi lintas pihak, temuan ini konvergen dengan Deyanti (2024) yang menyoroti pentingnya sinergi kepala sekolah dan guru BK dalam supervisi layanan. Penelitian ini memperluas cakupan kolaborasi tersebut hingga mencakup wali kelas, orang tua, dan mitra eksternal, sehingga menghasilkan gambaran ekosistem kolaboratif yang lebih komprehensif dibandingkan fokus dyadic kepala sekolah-guru BK pada penelitian tersebut.

Keempat, mengenai beban administrasi non-BK, temuan ini selaras dengan Khairani dkk. (2024) yang mengaitkan lemahnya kualitas supervisi dengan pelaksanaan BK yang kurang optimal. Titik pembeda yang ditawarkan penelitian ini adalah penamaan eksplisit fenomena tersebut sebagai *role diffusion* dan penempatannya sebagai persoalan kebijakan struktural, bukan semata persoalan supervisi teknis, sehingga level analisis bergeser dari operasional menuju sistemik.

Kelima, terkait efektivitas FGD berbasis praktisi, temuan ini konsisten dengan Suryana (2024) yang menemukan bahwa paparan mahasiswa terhadap narasi praktisi meningkatkan skor pemahaman aplikatif. Penelitian ini memperkaya temuan tersebut dengan data proses, yakni pola transformasi bertahap kualitas pertanyaan mahasiswa selama FGD berlangsung, sehingga turut menjelaskan bagaimana, bukan hanya bahwa, paparan praktisi meningkatkan pemahaman.

Keenam, dalam hal peluang digitalisasi layanan, temuan ini beririsan dengan Wulandari dkk. (2024) dan Renidayati dkk. (2026). Ketiga penelitian sepakat bahwa transformasi digital memperluas jangkauan layanan BK, tetapi penelitian ini menempatkan temuan tersebut dalam kerangka dialektis, yaitu setiap peluang digital berpasangan dengan tantangan etika dan risiko ketergantungan medium, nuansa yang relatif kurang ditekankan pada kedua penelitian pembandingan yang cenderung optimistis terhadap digitalisasi.

Secara umum, pola perbandingan ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak sekadar mereplikasi temuan-temuan terdahulu, melainkan memperkaya pemahaman tentang manajemen BK melalui tiga kontribusi khas: penyediaan data proses yang menjelaskan mekanisme di balik hasil, bukan hanya korelasi hasil semata; integrasi perspektif lintas isu (manajemen, pembelajaran, dan kebijakan) yang pada penelitian terdahulu cenderung dibahas terpisah; serta pembingkai ulang sejumlah tantangan sebagai persoalan struktural-sistemik, bukan semata persoalan kompetensi atau supervisi individual guru BK.

Implikasi Praktis bagi Pengembangan Manajemen BK di Sekolah

Temuan-temuan di atas membawa sejumlah implikasi praktis yang dapat ditindaklanjuti oleh berbagai pemangku kepentingan.

Bagi sekolah dan kepala sekolah, hasil penelitian menegaskan perlunya kebijakan internal yang secara eksplisit membatasi penugasan guru BK pada fungsi-fungsi non-BK, disertai deskripsi kerja tertulis yang merujuk pada standar kompetensi profesional. Kepala sekolah juga perlu memfasilitasi forum koordinasi lintas unsur secara reguler, bukan insidental, agar pengorganisasian layanan BK berjalan sebagai sistem, bukan sekadar inisiatif individual guru BK.

Bagi dinas pendidikan dan pembuat kebijakan, kesenjangan antara rasio ideal (1:150) dan rasio riil di lapangan (1:400-600) yang teridentifikasi dalam penelitian ini menegaskan urgensi penambahan formasi guru BK serta insentif penempatan di sekolah dengan keterbatasan sumber daya. Kebijakan yang hanya menuntut inovasi dari guru BK tanpa memperbaiki rasio berisiko menjadi solusi kosmetik yang tidak menyentuh akar masalah struktural.

Bagi program studi BK di perguruan tinggi, temuan tentang efektivitas FGD berbasis praktisi memberi justifikasi empiris untuk menjadikan model pembelajaran ini sebagai komponen standar, bukan pelengkap, dalam kurikulum mata kuliah manajemen dan praktikum BK. Pola transformasi bertahap kualitas pertanyaan mahasiswa yang teridentifikasi dalam penelitian ini dapat dijadikan indikator evaluatif untuk mengukur kedalaman pemahaman yang dicapai melalui metode tersebut.

Bagi guru BK di lapangan, strategi rebranding layanan BK, seperti perubahan nama ruang layanan dan kampanye publik tentang meminta bantuan sebagai tanda kekuatan, yang teridentifikasi dalam penelitian ini dapat direplikasi sebagai langkah taktis jangka pendek untuk mengurangi stigma, sembari menunggu perubahan kebijakan struktural yang membutuhkan waktu lebih panjang.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan empat simpulan pokok yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pertama, implementasi manajemen program BK di SMA telah berlangsung melalui siklus sistematis yang mencakup analisis kebutuhan peserta didik, perencanaan program berbasis data, pengorganisasian koordinasi multipihak, pelaksanaan layanan yang beragam dan humanis, evaluasi komprehensif, serta tindak lanjut yang terstruktur. Kualitas setiap tahapan dalam siklus ini saling berpengaruh, dan kelemahan pada satu tahapan akan berdampak kumulatif pada keseluruhan efektivitas program.

Kedua, pelaksanaan FGD dengan menghadirkan praktisi berpengalaman terbukti secara empiris meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang implementasi manajemen program BK. Metode ini efektif mentransfer pengetahuan tacit dari praktisi ke mahasiswa, mendorong refleksi kritis, dan mengintegrasikan perspektif lintas disiplin yang sulit dicapai melalui perkuliahan konvensional. FGD perlu menjadi komponen standar dalam kurikulum pendidikan calon konselor.

Ketiga, peluang pengembangan program BK di SMA terbuka lebar melalui lima jalur utama: kebijakan Kurikulum Merdeka yang menempatkan peserta didik sebagai pusat, perkembangan teknologi digital yang memperluas jangkauan dan inovasi layanan, meningkatnya kesadaran publik tentang kesehatan mental, penguatan kolaborasi lintas profesi, serta partisipasi orang tua yang semakin terbuka. Guru BK perlu secara proaktif dan strategis memanfaatkan peluang-peluang ini.

Keempat, tantangan implementasi dan pengembangan program BK bersifat multidimensional, mencakup tantangan struktural (rasio guru BK yang jauh dari ideal serta keterbatasan sarana dan prasarana layanan), tantangan peran (beban administrasi non-BK yang memicu fenomena *role diffusion*), tantangan kultural (stigma yang memandang BK sebagai layanan bagi siswa bermasalah serta rendahnya literasi stakeholder tentang fungsi esensial BK), dan tantangan kontekstual (pengaruh media sosial serta perubahan karakter generasi peserta didik). Keempat dimensi tantangan tersebut saling terkait dan sebagian besar berakar pada persoalan kebijakan dan alokasi sumber daya, bukan semata persoalan kompetensi individual guru BK, sehingga penanganan yang efektif membutuhkan intervensi simultan di level kebijakan (penataan ulang rasio dan tupoksi guru BK), kelembagaan (dukungan sarana dan forum koordinasi sekolah), serta individual (penguatan kompetensi dan strategi rebranding layanan oleh guru BK).

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi berupa deskripsi empiris yang menghubungkan tiga isu yang sebelumnya cenderung dikaji secara terpisah, yaitu manajemen program BK, efektivitas FGD berbasis praktisi sebagai metode pembelajaran, serta pemetaan peluang dan tantangan pengembangan BK di sekolah menengah. Kontribusi ini diharapkan memperkaya literatur pendidikan calon konselor sekaligus menjadi bahan refleksi bagi program studi BK dalam merancang pembelajaran yang lebih membumi. Sejalan dengan implikasi praktis yang telah diuraikan, disarankan agar sekolah menegakkan batas tegas antara tugas BK dan tugas administratif non-BK, dinas pendidikan mempercepat pemenuhan rasio ideal guru BK sesuai regulasi yang berlaku, program studi BK menjadikan FGD berbasis praktisi sebagai komponen standar kurikulum, dan guru BK di lapangan terus mengembangkan strategi rebranding layanan untuk mengikis stigma. Penelitian lanjutan dengan cakupan informan dan lokasi yang lebih luas juga diperlukan untuk menguji ketertransferan temuan ini pada konteks sekolah yang berbeda.

Simpulan

American School Counselor Association (ASCA). (2019). *ASCA national model: A framework for school counseling programs* (4th ed.). American School Counselor Association. <https://www.schoolcounselor.org/asca/media/asca/home/ANMExecSummary.pdf>

Andhini, L. P. R., dkk. (2024). FGD dan Psikoedukasi Guru BK: Meningkatkan Penanganan Kesehatan Mental Remaja. *UNBI Mengabdi*, 5(1), 21–28. <https://doi.org/10.34063/um.v5i1.415>

- Asni, A., & Rahmadina, A. (2026). Manajemen Layanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Analisis Beban Kerja Guru: Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 20962–20972. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5584>
- Carey, J., & Dimmitt, C. (2012). School counseling and student outcomes: Summary of six statewide studies. *Professional School Counseling*, 16(2).
- Corey, G. (2017). *Theory and practice of counseling and psychotherapy* (10th ed.). Cengage Learning.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahir, C. A., & Stone, C. B. (2016). *The transformed school counselor* (3rd ed.). Cengage Learning. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-67349-1>
- Deyanti, S. (2024). Kolaborasi antara Kepala Sekolah dan Guru BK sebagai Strategi Optimalisasi Supervisi Bimbingan Konseling. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* Vol.2, No.3. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.136>
- Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2012). *Developing and managing your school guidance and counseling program* (5th ed.). American Counseling Association.
- Hergenhahn, B. R., & Olson, M. H. (2013). *An introduction to theories of learning* (9th ed.). Pearson Education.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka*. Kemendikbudristek. <https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas*. Kemendikbudristek. <https://bimbingankonseling.kemdikbud.go.id/>
- Khairani, N. R., dkk. (2024). Analisis Kualitas Supervisi dan Evaluasi Serta Dampaknya Terhadap Pelaksanaan BK di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3). <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.135>
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed., revised). Pearson Education. <https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780133892406/samplepages/9780133892406.pdf>
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2014). *Focus groups: A practical guide for applied research* (5th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/focus-groups/book246327>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya. <https://www.rosdakarya.com/>
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2019). *The wise company: How companies create continuous innovation*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190497002.001.0001>
- Nursalim, M. (2021). *Strategi konseling: Teori dan aplikasi untuk guru BK dan konselor*. Kencana.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. (2014). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2014_Nomor111.pdf
- Prayitno. (2018). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling* (edisi revisi). PT Rineka Cipta. <https://www.rineka-cipta.co.id/>
- Renidayati, R., Karneli, Y., Ifdil, I., & Netrawati, N. (2026). Transformasi Layanan Bimbingan Konseling Era Society 5.0: Integrasi AI dan Humanistik Kultural. *Jurnal Keperawatan*, 18(2).
- Santika, N. A., dkk. (2024). Dampak Dari Kurangnya Sarana Yang Memadai Bagi Guru Bk Dalam Pelaksanaan Pelayanan Konseling Di Sekolah. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*. Vol. 18, No. 2. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i2.5899>
- Santrock, J. W. (2021). *Adolescence* (18th ed.). McGraw-Hill Education.

- Simon, I. M., Indreswari, H., Probowati, D., Prihatiningsih, R., & Pratiwi, A. S. (2025). Guidance and Counselling Services through Online Content Development: an Innovative Approach in the Digital Era. *Bisma The Journal of Counseling*, 9(1), 46–53. <https://doi.org/10.23887/bisma.v9i1.92736>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Alfabeta.
- Sukmadiningsih, R., & Herdi (2025). Analisis Kebutuhan Siswa untuk Pengembangan Program BK di SMA: Pendekatan Systematic Literature Review (SLR). *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*. Vol. 9, No. 2.
- Sulalah, A., AR, M. M., & Astutik, C. (2024). Strategi Layanan Bimbingan Konseling di Era Merdeka Belajar. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 301–308.
- Sumarto. (2022). *MANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH/ MADRASAH*. Penerbit Buku Literasiologi.
- Suryana, S. (2024). Pengaruh Praktisi Mengajar Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Pendidikan Konsumen. *Jurnal MediaTIK: Jurnal Media Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer*. Vol.7 No.2. <https://doi.org/10.59562/mediatik.v7i2.2513>
- Wulandari, T., dkk. (2024). Inovasi layanan bimbingan dan konseling berbasis digital di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Konselor*, 6 (6). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i6.7923>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/case-study-research-and-applications/book250150>